



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap berbagai perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal tersebut setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2018 - 2023 merupakan penjabaran visi dan misi dan Program Walikota yang akan diwujudkan dalam satu periode masa jabatan.

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta



digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Babakan ciparay Kota Bandung dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2018 - 2023. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

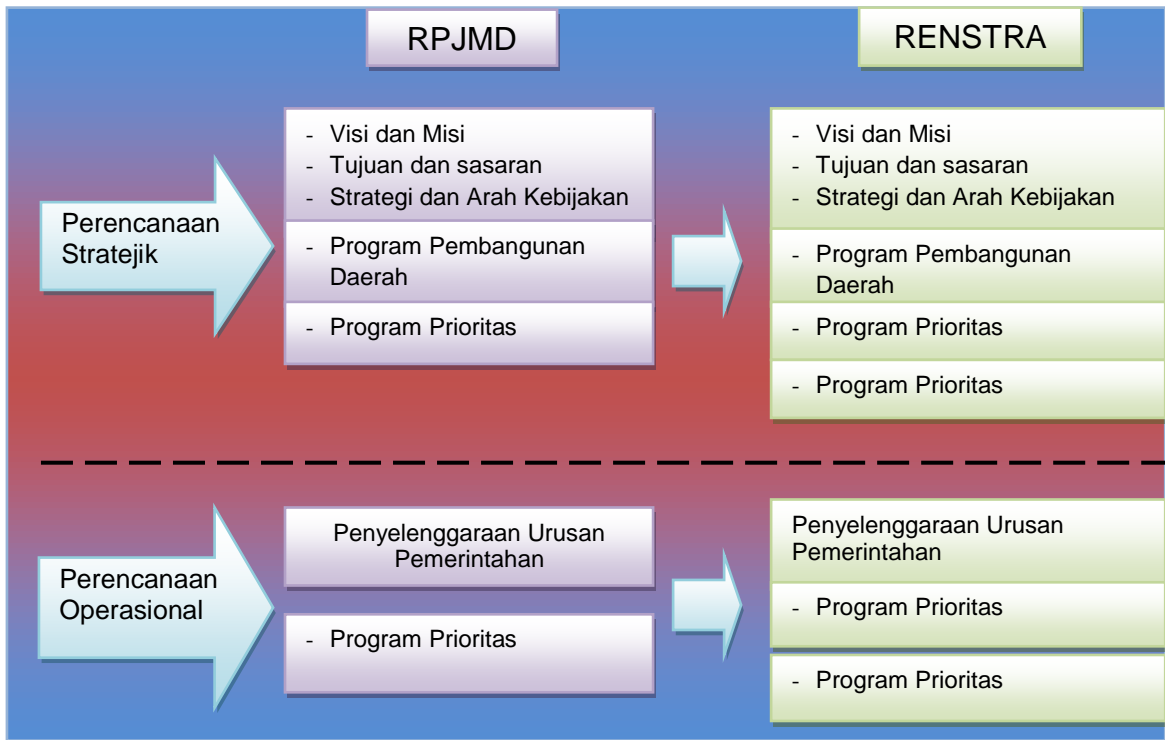
Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui adalah sebagai berikut ;

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD;
- c. Tahapan penetapan Renstra SKPD

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Babakan ciparay selaku kepala SKPD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kota Bandung.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung 2018 - 2023 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Bandung tahun 2018 - 2023 dan Renja SKPD, ilustrasi keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1



Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rencana Strategis Kecamatan Babakan Ciparay sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Bandung berupaya menjabarkan visi dan misi Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan tugas dan wewenang yang dilimpahkan walikota.

Renstra Kecamatan Babakan ciparay Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 ini mengacu pada visi, misi dan program Walikota Bandung yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan Renstra Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 berpedoman pada RPJP Daerah Kota Bandung Tahun 2005 – 2025 dan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 -



2023 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017.

Diharapkan dengan Rencana Strategis dapat tersusun dokumen perencanaan Jangka menengah Kecamatan Babakan Ciparay dalam 5 Tahun ke depan yang menyeluruh dan berkesinambungan yang dihasilkan dari proses penyusunan perencanaan yang transparan dan partisipatif.

Adapun Hierarki perencanaan pembangunan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Kecamatan mengacu kepada RPJMD Kota Bandung.
2. RPJMD Kota Bandung mengacu kepada RPJP Kota Bandung (2005-2025) dengan memperhatikan RPJM Nasional dan Daerah Provinsi.
3. Rencana Strategis Kecamatan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tiap tahun.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Yang menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Babakan Ciparay adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
9. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;



16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
20. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2000 tentang pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
23. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2010-2030.



26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 - 2023;
27. Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Kecamatan Babakan Ciparay Tahun 2018 - 2023 ini disusun untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja Kecamatan Babakan Ciparay 5 (lima) Tahun ke depan yang merupakan periode awal renstra Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 dalam upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung tahun 2018 - 2023 adalah :

1. Menciptakan keselarasan antara visi, misi , tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kecamatan Babakan Ciparay, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung.
2. Sebagai landasan operasional bagi seluruh Kelurahan di lingkungan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Bandung, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dalam mencapai



tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

4. memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bagian Keenam Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan susunannya adalah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, dan keterkaitan renstra dengan RKT dan Renja.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Gambaran Pelayanan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat



penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN SKPD

Memuat penjelasan mengenai Tujuan dan Sasaran jangka menengah SKPD berserta indikator kerjanya

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD periode berkenaan dengan Tujuan, Sasaran, strategi dan arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah ditetapkan selama lima tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan

BAB VII INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BABAKAN CIPARAY KOTA BANDUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BABVIII PENUTUP



BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD



2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Babakan Ciparay mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
2. Pelayanan publik; dan
3. Pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan

Sedangkan uraian tugas dan fungsi camat pada Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan sebagai berikut:

Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Camat mempunyai fungsi:



1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
5. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Kecamatan;
6. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang Undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program kerja, dan anggaran kecamatan berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;



3. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Walikota agar tujuan dan sasaran tercapai;
4. Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
5. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;
6. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan yang meliputi Sekretaris, Sub Bagian dan Seksi;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Kecamatan;
8. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Kecamatan;
9. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
10. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan rencana kerja Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan



- lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Kecamatan;
 13. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan lingkup Kecamatan;
 14. Menyelenggarakan, mengoordinasikan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 15. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban serta upaya penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 16. Meningkatkan kualitas upaya penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan;
 17. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan;
 18. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peran pembinaan kepemudaan;
 19. Memberikan fasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kecamatan;
 20. Melaksanakan pemeliharaan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kerjanya;
 21. Menyelenggarakan pengoordinasian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;



22. Melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan dan Pelayanan Administrasi Pertanahan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS);
23. Melaksanakan kegiatan yang merupakan Kewenangan Pemerintah Kota yang dilimpahkan kepada Kecamatan;
24. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
25. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
26. Menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Kecamatan;
27. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan; dan
28. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
29. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugasnya.

Sekretariat Kecamatan

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan kecamatan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan dan kelurahan;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;



- d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi
- e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administratif kegiatan kesekretariatan dan kecamatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang umum dan kepegawaian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Kecamatan, penyelenggaraan kerumahtanggaan Kecamatan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas, serta pelaksanaan administrasi kepegawaian; dan
 - c. pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

4. Sub bagian Keuangan dan Program

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang keuangan dan program.



- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Kecamatan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Kecamatan;
 - c. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program serta koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan; dan
 - d. pengkoordinasian pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Kecamatan.

5. Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pemerintahan
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan data dan materi bahan lingkup pemerintahan;
 - b. pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
 - c. pelayanan administrasi pertanahan;
 - d. pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan;



- e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan dengan Instansi terkait; dan
- f. pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan
- g. penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan;
- h. pelayanan data dan informasi Kecamatan;
- i. pelayanan administrasi kependudukan;
- j. pelayanan administrasi umum lainnya;
- k. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan Instansi Terkait; dan
- l. pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan data dan bahan materi lingkup ketentraman dan ketertiban;
 - b. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
 - d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ketentraman dan ketertiban dengan Instansi terkait; dan
 - f. pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman dan ketertiban.



7. Seksi Kesejahteraan Sosial

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang Kesejahteraan sosial ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan data dan bahan materi lingkup kesejahteraan sosial;
 - b. inventarisasi dan fasilitasi masalah sosial kemasyarakatan;
 - c. inventarisasi potensi bidang pendidikan formal dan informal;
 - d. pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
 - e. fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda;
 - f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang pendidikan dan kemasyarakatan dengan Instansi terkait; dan
 - g. pelaporan pelaksanaan lingkup bidang pendidikan dan kemasyarakatan.

8. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

- (1) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:



- a. penyusunan data dan bahan materi lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup;
- b. fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- c. inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;
- d. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- e. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup
- f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, pembangunan, serta lingkungan hidup dengan Instansi terkait; dan
- g. pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.

9. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pengkajian/penelaahan dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Atasan;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Kelurahan serta seluruh Subbagian dan Seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - d. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tingkat Kecamatan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menyiapkan data di bidang pemberdayaan masyarakat tingkat Kecamatan sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan Atasan;
-

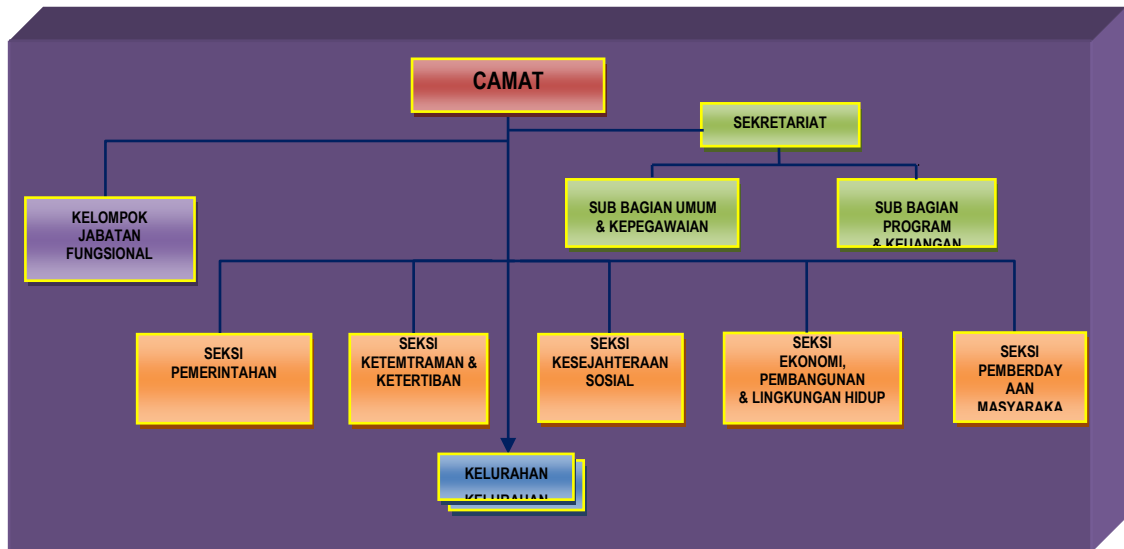


- f. menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tingkat Kecamatan;
 - g. menyiapkan bahan pembinaan di bidang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tingkat Kecamatan guna meningkatkan pelayanan di tingkat Kecamatan;
 - h. menyiapkan bahan serta sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan terkait pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tingkat Kecamatan sesuai dengan rencana kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai bahan evaluasi;
 - j. melaksanakan pembinaan kepada Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
-



Adapun susunan organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016, untuk Kecamatan memiliki struktur sebagai berikut :

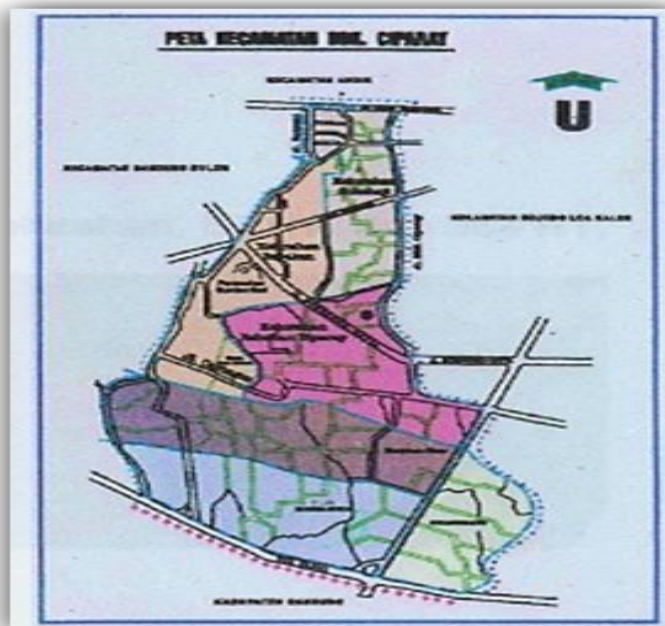
Gambar 2.1



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Babakan Ciparay terletak pada posisi 107⁰ 36' Bujur Timur dan 6⁰ 55' Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 675 di atas permukaan laut dan permukaan tanah relatif datar.

Peta Kecamatan Babakan Ciparay adalah sebagai berikut :



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung; maka secara administratif batas wilayah Kecamatan Babakan Ciparay adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Andir
- Sebelah Timur : Kecamatan Bojongloa Kaler
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kabupaten Bandung
- Sebelah Barat : Kecamatan Bandung Kulon



Pembagian Wilayah Kecamatan Babakan Ciparay

No.	KELURAHAN	JUMLAH	
		RW	RT
1.	Babakan Ciparay	9	57
2.	Babakan	13	88
3.	Sukahaji	10	89
4.	Margahayu Utara	11	56
5.	Margasuka	9	43
6.	Cirangrang	5	32
Jumlah		57	365

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Babakan Ciparay Tahun 2021

2.1.1. Sumber Daya Manusia Kecamatan Babakan Ciparay

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 59 orang. Dari jumlah pegawai tersebut, di samping Camat sebanyak 1 orang, 17 orang (34%) merupakan pegawai di Kecamatan Babakan Ciparay, Kelurahan Babakan Ciparay 9 orang (12%), Kelurahan Babakan 5 orang (10%), di Kelurahan Sukahaji 7 orang (10%), Kelurahan Margahayu Utara 7 orang (12%), Kelurahan Margasuka 6 orang (12%) dan di Kelurahan Cirangrang 7 orang (10%).

Jumlah pegawai eselon III sebanyak 2 orang yaitu Camat dan Sekretaris Kecamatan, Eselon IVa sebanyak 9 orang yaitu 4 (empat) kepala Seksi dan 5 (lima) Lurah, Eselon IVb sebanyak 19 orang yaitu para kepala sub bagian pada Sekretariat Kecamatan dan Kasi pada Kelurahan. Pelaksana sebanyak 28 orang dengan jumlah pelaksana terbanyak berada di Sub Bagian Keuangan dan Program Kecamatan Babakan Ciparay dan Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Babakan Ciparay, sebagaimana tabel di bawah ini :



Tabel 2.1

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kecamatan Babakan Ciparay	-	-	2	6	9	17
2	Kelurahan Babakan Ciparay	-	-	-	5	4	9
3	Kelurahan Babakan	-	-	-	4	1	5
4	Kelurahan Sukahaji	-	-	-	3	3	6
5	Kelurahan Margahayu Utara	-	-	-	4	3	7
6	Kelurahan Margasuka	-	-	-	4	2	6
7	Kelurahan Cirangrang	-	-	-	4	3	7
	JUMLAH	-	-	2	30	25	59

Sumber : Sekretariat Kecamatan Babakan Ciparay Tahun 2021

Tabel 2.2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS	TKK	MAGANG
1	Pasca Sarjana (S3)	-	-	-
2	Pasca Sarjana (S2)	3	-	-
3	Sarjana (S1)/D4	24	-	-
4	Diploma 3 (D3)	3	-	-
5	Diploma 1 (D1)	1	-	-
6	SLTA	20	-	-
7	SLTP	-	-	-
8	SD	-	-	-
	JUMLAH	59	-	-

Sumber : Sekretariat Kecamatan Babakan Ciparay Tahun 2021

Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, sebanyak 50 orang (100%) memiliki pendidikan S2 sebanyak 3 orang (8%), yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 24 orang (44%), yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 3 orang (6%), yang memiliki pendidikan D1 sebanyak 1 orang (2%) dan pegawai yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 20 orang (40%).



2.1.2. Geografi dan Demografi Kecamatan Babakan Ciparay

Gambaran Geografi yang merupakan luas wilayah Kecamatan Babakan Ciparay beserta penggunaannya serta demografi penduduk Kecamatan Babakan Ciparay dapat diuraikan sebagai berikut:

Geografi

Luas Wilayah	744,9 hektar
• Lahan Pemukiman/Perumahan	hektar
• Sawah	hektar
• Ladang	hektar
• Kuburan	hektar
• Tanah Tegalan	hektar
• Perkantoran	hektar
• Fasos / Fasum	hektar
• Kolam	hektar

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Babakan Ciparay Tahun 2018

Demografi

Jumlah Penduduk Kecamatan Babakan Ciparay per bulan Desember 2018, tercatat sebanyak **121.013** jiwa yang terdiri dari Laki-laki **60.895** jiwa dan Perempuan **60.118** jiwa, lebih rincinya dapat terlihat dalam tabel berikut ini:



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

NO	KELURAHAN	RW	RT	KK	LAKI-LAKI (jiwa)	PEREMPUAN (jiwa)	JUMLAH (jiwa)
1.	Babakan Ciparay	9	57	4.011	11.617	11.068	22.685
2.	Babakan	13	88	7.258	13.462	15.047	28.509
3.	Sukahaji	10	89	23.013	12.005	11.117	23.122
4.	Margahayu Utara	11	56	4.051	8.713	8.472	17.185
5.	Margasuka	9	43	2.524	4.750	4.784	9.534
6.	Cirangrang	5	32	1.852	4.465	3.944	12.696
JUMLAH		57	365	42.709	55.012	54.432	109.444

DATA PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN

No	Status Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	26.183 orang
2	Belum Tamat SD	18.538 orang
3	Tamat SD	16.760 orang
4	Tamat SLTP	21.946 orang
5	Tamat SLTA	23.483 orang
6	Tamat Akademi	5.209 orang
7	Tamat Universitas	4.355 orang
8	Tidak Tamat SD	5.540 orang

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Babakan Ciparay Tahun 2018

Adapun Fasilitas Umum yang terdapat di Kecamatan Babakan Ciparay dapat diuraikan sebagai berikut :

Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK / TPA	14 buah
2	SD / MI	14 buah
3	SMP / MTS	9 buah
4	SMA / SMK	6 buah
5	AKADEMI	- buah
6	PERGURUAN TINGGI	- buah
7	SLB Swasta	- buah
8	Madrasah Ibtidaiyyah	- buah
9	Kursus	- buah
10	SLTP Terbuka	- buah

Sumber : Seksi Kesos Kecamatan Babakan Ciparay Tahun 2021



Data Sarana Kesehatan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	2 buah
2	Praktek Dokter	15 buah
3	Apotek	8 buah
4	Posyandu	47 buah
5	Bidan Bersalin	9 buah
6	Mantri	5 buah

Sumber : Seksi Kesos Kecamatan Babakan Ciparay Tahun 2021

Bidang Olah Raga

No	Potensi Yang Dimiliki	Jumlah
1	Sepak Bola	2
2	Basket	3
3	Voli Ball	3
4	Bulu Tangkis	16
5	Tenis Meja	12
6	Futsal	3

Sumber : Seksi Kesos Kecamatan Babakan Ciparay Tahun 2021

Sarana Ekonomi

No	Sarana dan Prasarana Ekonomi	Jumlah
1	Pasar	2 buah
2	Warung/Kios	623 buah
3	Toko	262 buah
4	Bank	9 buah
5	Supermarket	17 buah

Sumber : Seksi Ekbang & LH Kecamatan Babakan Ciparay Tahun 2021

Sarana Peribadatan

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Mesjid	106 buah
2	Mushola	30 buah
3	Langgar	- buah
4	Gereja	12 buah
5	Vihara	4 buah

Sumber : Seksi Kesos Kecamatan Babakan Ciparay Tahun 2021



2.2 Kinerja Pelayanan Kecamatan

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Babakan Ciparay berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 009 tahun 2007, berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan SKPD ini mengacu pada hasil kerja bagian B.2.1.2. Adapun tabel 2.3 dan 2.4 yang perlu disajikan adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BABAKAN CIPARAY
KOTA BANDUNG TAHUN 2013-2018**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi Kecamatan Babakan Ciparay	Target SP M	Target IK K	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	100	100	100	100	-	66	72	72	77	-	0,6	0,72	0,72	0,7	-
2	Prosentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	-	-	-	100	100	100	100	-	95	91	91	85	-	95	91	91	85	-
3	Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI	-	-	-	0	0	100	100	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
4	Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	-	-	-	100	100	100	100	-	81	94	94	93	-	80	94	94	93	-



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

5	Prosentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu	-	-	-	100	100	100	100	-	93	99	99	94	-	0,9	0,9	0,9	0,9	-
6	Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	-	-	-	100	100	100	100	-	95	82	82	88	-	0,9	0,8	0,8	0,8	-
7	Prosentase RW Juara				-	51,6 1	77,1 0	-	-	40,3 3	77,9 6	77,2 7	n/a	-	80	82	85	95	-
8	Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif				-	70	75	75	78	71	71,4 3	78,5 7	80	95,08	111,11	81,6	121,89	-	-
9	Rasio Anggota Linmas				-	1:01	1:1. 10	n/a	n/a	0,94 :1	1:1, 09	1:1. 10	n/a	n/a	188	100, 00%	100, 92%	-	-
10	Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan				100	100	100	100	-	66	72	72	77	-	0,6	0,72	0,72	0,7	-
11	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan				-	70	75	75	78	71	71,4 3	78,5 7	80	95,08	111,11	81,6	121,89	-	-



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

12	Nilai Evaluasi AKIP				52	60	63.10	n/a	n/a	53,33	62,88	63,53	n/a	n/a	102,56	88,56%	100,68%	n/a	n/a
13	Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	-	-	-	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100,00%	100%	n/a	n/a



**Tabel.2.4
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN BABAKAN CIPARAY
KOTA BANDUNG**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	An gga ran	Re alis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	13.264.135.300	20.957.568.381	24.665.962.484	28.148.208.118	37.063.845.747	11.310.449.227	19.978.447.997	23.847.837.545	26.032.210.920	26.021.694.918	95.33	95.33	96.68	92.48	70.21	77.95	83.01



Interpretasi dari tabel 2.4

Dari table diatas dapat kita mengambil kesimpulan dari data hasil pelayanan kinerja pelayanan Kecamatan Babakan Ciparay yang telah dilaksanakan dan maksimal selama kurun waktu renstra 2013-2018 ada 3 kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Perekonomian Masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi Kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat seperti pembinaan UKM dan Koperasi dan pembinaan/sosialisasi peluang usaha dimana hasil belum maksimal sesuai target yang telah ditetapkan
2. Pelayanan Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat seperti Potisasi, Kegiatan Pengadaan Bibit tanaman, di wilayah kecamatan Babakan Ciparay dan sebagainya.
3. Pelayanan Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban dengan Pembinaan dan Pelatihan Linmas, Pembentukan SATWANKAR diwilayah Kecamatan Babakan Ciparay dan sebagainya.



**BAB III
ISU-ISU STRATEGI**



3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan dinamika dan sinkronisasi antara kegiatan Kecamatan Babakan Ciparay dengan kebutuhan dan kondisi faktual yang ada dalam organisasi, maka pengenalan lingkungan strategis sangat penting untuk diperhatikan dalam konteks analisis lingkungan strategis ini. Untuk itu Kecamatan Babakan Ciparay berupaya mengenali lebih dalam faktor-faktor internal dan eksternal yang diprediksi dapat mempengaruhi terhadap kinerja pencapaian visi dan misi Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Babakan Ciparay, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Babakan Ciparay dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Babakan Ciparay sebagai berikut :

1. Optimalnya kualitas pelayanan Public pada Kecamatan, nilai IKM Kecamatan Tahun 2020 = 82.86 %
2. Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan ditandai dengan nilai AKIP Kecamatan Tahun 2017 sebesar =



3. Opini BPK WDP (Wajar Dengan Pengecualian) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung dimana Kecamatan Babakan Ciparay merupakan salah satu SKPD di dalamnya

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Babakan Ciparay dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Babakan Ciparay, sebagai berikut:

1. Kelurahan yang telah melaksanakan tertib administrasi Kelurahan sebesar 90 %
2. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan
3. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD
4. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008
5. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah
6. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan
7. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan bencana masih rendah
8. Masing kurangnya pemahaman aparatur terhadap PBJ (metode swakelola)

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Babakan Ciparay, sebagai berikut

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan Program dan kegiatan kepada Pemerintah Kota Bandung
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Babakan Ciparay sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk menangani sebagian urusan otonomi



daerah yang kewenangannya dilimpahkan sebagian oleh Walikota adalah factor internal dan eksternal Kecamatan Babakan Ciparay, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Belum adanya koordinasi yang baik dengan satuan kerja perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dalam kurun waktu 2018 - 2023, adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan



yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excellent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang



sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Babakan Ciparay dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan good governance.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.



Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian



(termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

Faktor internal berupa kekuatan/potensi (*strengths*) dan kelemahan-kelemahan (*weaknesses*) penting untuk dipahami seberapa besar kekuatan/potensi organisasi yang dapat dimanfaatkan dan seberapa banyak kelemahan-kelemahan organisasi harus diatasi.

Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang timbul dari lingkungan luar organisasi tetapi dapat memberikan pengaruh kuat terhadap kinerja organisasi adalah berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang mungkin timbul pada masa yang akan datang.

3.1.1 Analisis Lingkungan Internal :

1) Kekuatan/Potensi :

- (a) Adanya Perda Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan



Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sebagai dasar hukum kedudukan dan keberadaan Kecamatan Babakan Ciparay.

- (b) Adanya Perda Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RT/RW) Kota Bandung, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 ; sebagai dasar orientasi pengembangan kebijakan dan program Kecamatan Babakan Ciparay.
- (c) Adanya pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Bandung untuk dijalankan di Kecamatan Babakan Ciparay melalui Keputusan Walikota Nomor 870 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat, meskipun masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut.
- (d) Wilayah kerja dan lokasi kantor Kecamatan Babakan Ciparay cukup strategis, terletak di pusat Kota Bandung dan berada dikawasan perekonomian yang maju.

2) Kelemahan :

- (a) Kuantitas dan Kualitas teknis SDM yang ada di lingkungan Kecamatan Babakan Ciparay belum memadai.



- (b) Sarana dan prasarana Kecamatan Babakan Ciparay kurang memadai.
- (c) Keterbatasan anggaran yang dikelola Kecamatan Babakan Ciparay.
- (d) Penyelenggaraan pelayanan belum optimal.

3.1.2 Analisis Lingkungan Eksternal :

3) Peluang :

- (a) Peningkatan pengetahuan aparatur melalui Diklat dan Pelatihan.
- (b) Usulan penambahan personil aparatur Kecamatan dan Kelurahan.
- (c) Dekat dengan pusat Pemerintahan Kota Bandung.
- (d) Dilalui jalan utama yang menjadi pusat wisata belanja di Kota Bandung.

4) Hambatan/Ancaman :

- (a) Kepadatan penduduk tinggi.
- (b) Dinamika sosial yang cepat yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial.
- (c) Kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan.



- (d) Tingkat penduduk komuter dan musiman yang cukup tinggi. Cukup tinggi keluarga pra sejahtera dan pengangguran, akibat urbanisasi.
- (e) Sarana dan prasarana lingkungan pemukiman belum tertata dengan baik.
- (f) Keindahan dan kerapihan sarana dan prasarana umum belum tertata.
- (g) Keberadaan PKL yang sulit dikendalikan.

3.1.3 Analisis Lingkungan Strategis

Berdasarkan hasil analisis terhadap kekuatan/potensi dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang diperkirakan muncul, maka perumusan strategi yang diperlukan untuk memanfaatkan dan mengatasi berbagai kemungkinan tersebut dilakukan melalui tahap analisis strategi.

Hasil analisis strategi tersebut dirumuskan menjadi beberapa strategi berikut ini :

- a. Strategi kekuatan-peluang (*strengths-opportunities*)
 - . Memperkuat komitmen internal Kecamatan Babakan Ciparay untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara profesional.



- . Mengoptimalkan potensi sentra perdagangan, perkantoran dan sarana prasarana yang ada di Kecamatan Babakan Ciparay untuk keberhasilan pencapaian program melalui kemitraan.
- b. Strategi kekuatan-ancaman (*strengths-treatment*)
 - . Mengendalikan penduduk dengan meningkatkan KIPEM, KIK, dan memperketat pengawasan ijin menetap.
 - . Melakukan pengawasan dan penertiban kependudukan melalui operasi yustisi lokal secara berkala dan bekerjasama dengan instansi terkait.
 - . Meningkatkan sosialisasi produk hukum daerah dan lainnya.
 - . Mengadakan pelatihan dan program-program bantuan sosial ekonomi untuk mengatasi masalah pengangguran dan keluarga pra sejahtera.
 - . Menata sarana dan prasarana lingkungan sesuai dengan kebijakan Pemkot.
- c. Strategi kelemahan-peluang (*weakness-opportunities*)
 - . Mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Kecamatan bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah, Badan Diklat Provinsi, Balai Diklat lainnya.



- . Meningkatkan partisipasi aktif *stakeholder* di dalam rangka menunjang peningkatan sarana dan prasarana Kecamatan Babakan Ciparay.
- . Mengoptimalkan anggaran Kecamatan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan secara partisipatif.
- d. Strategi kelemahan-ancaman (*weakness-treatment*)
 - . Mengusulkan penambahan SDM sesuai dengan kebutuhan.
 - . Meningkatkan sarana dan prasarana Kecamatan.
 - . Mengoptimalkan anggaran dan sumber daya yang ada dalam melaksanakan pelayanan masyarakat.

Melalui analisa strategis, maka strategi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang profesional serta pro-aktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
2. Mengoptimalkan potensi yang ada dan tersedia untuk meningkatkan perekonomian lokal dan ketentraman serta ketertiban lingkungan sosial yang harmonis.
3. Meningkatkan upaya penataan lingkungan pemukiman, dan sarana dan prasarana umum di wilayah Kecamatan Babakan Ciparay dengan dukungan partisipasi masyarakat.



3.1.4 Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

Adapun faktor-faktor kunci keberhasilan di Kecamatan Babakan Ciparay diantaranya adalah :

- Komitmen dan sinergi yang kuat dari aparaturnya Pemerintah Kecamatan dan warga Kecamatan Babakan Ciparay.
- Ketertiban dan keamanan di Kecamatan Babakan Ciparay yang kondusif.
- Kepemimpinan Kecamatan Babakan Ciparay yang ditunjang kemampuan manajerial yang unggul, dan mampu menjadi motivator dan dinamisor lingkungan kecamatan.
- Sumber Daya Manusia (pegawai) Kecamatan Babakan Ciparay yang menjunjung profesionalisme, berkomitmen kuat terhadap tujuan organisasi serta memiliki dedikasi dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- Kebijakan kecamatan yang terintegrasi dengan kebijakan kota, mampu menjamin kesinambungan program dan berbasis pada kebutuhan lokal.
- Keterpaduan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi dengan menghilangkan ego sektoral.
- Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu memacu peningkatan kinerja setiap pegawai.



- Tersedianya prasarana dan sarana kantor yang dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpelihara.
- Konsisten dan fokus terhadap evaluasi perkembangannya dan kemajuan untuk perbaikan dan penyempurnaan pelayanan prima.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023, yaitu:

**“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG
UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”**

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

Bandung : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam



satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang,

Unggul : Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik di setiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.

Nyaman : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan,

Sejahtera : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari



kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Agamis : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan

Dengan demikian visi Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis bermakna “Layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur, dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan



dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing

Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif, efisien dan melayani

Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima.

3. Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan

Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal.



4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah "Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa".

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yaitu Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan melalui strategi :



- a. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;
- b. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi;
- d. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar;
- e. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.

Terhadap Renstra kementerian Dalam Negeri, Renstra Kecamatan Babakan Ciparay tidak terdapat keterkaitan secara langsung, dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan Panyileukan adalah mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Bandung, dan merupakan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kota Ke Kecamatan Babakan Ciparay.

3.3.2 Penelaahan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 disusun dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.



Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Selanjutnya, dalam melaksanakan agenda pembangunan, maka ditetapkan beberapa sasaran makro dan target pembangunan untuk periode 2020-2024.

**Gambar 3.1
Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Nasional
Tahun 2020-2024**



Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024



- Transformasi struktural berjalan
 - Produktifitas tenaga kerja meningkat
 - Iklim investasi kondusif
 - GNI per kapita USD 3.896 – USD 12.055
1. Sejahtera dapat diwujudkan dengan:
 - Kualitas hidup meningkat
 - Perilaku disiplin dan beradab
 - SDM berkualitas dan berdaya saing
 - Indeks kebahagiaan meningkat
 2. Adil dapat diwujudkan dengan:
 - Ketimpangan menurun
 - Redistribusi berjalan baik
 3. Berkesinambungan dapat diwujudkan dengan:
 - Memperhatikan daya dukung dan daya tampung (Low Carbon Development)
 - Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional

Arah kebijakan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024, adalah:

1. Pembangunan manusia
 - a. Pelayanan dasar dan perlindungan sosial
 - b. SDM berkualitas dan berdaya saing
2. Pembangunan ekonomi
 - a. Pangan dan pertanian
 - b. Energi, mineral, dan pertambangan
 - c. Kelautan dan kemaritiman
 - d. Pariwisata



- e. Ekonomi kreatif dan digital
- f. Industri manufaktur
- 3. Pembangunan infrastruktur
- 4. Pembangunan politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan
- 5. Pembangunan kewilayahan

Adapun isu strategis Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia:
 - Pelayanan Dasar
 - SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Pembangunan ekonomi:
 - Pangan
 - Energi
 - Pariwisata, ekonomi Kreatif dan Digital
 - Industri Manufaktur Kelautan dan Kemeritiman
3. Pembangunan kewilayahan:
 - Sentra Pertumbuhan
 - Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan
4. Pembangunan Infrastruktur:
 - Transportasi
 - Telekomunikasi
 - Sumber Daya Air Perumahan dan Pemukiman
5. Pembangunan Polhukkamhan:
 - Hukum dan Regulasi
 - Hankam
 - Politik



Penelaahan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat

Penelaahan terhadap Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi.

Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, adalah:

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

Jabar Juara Lahir Batin : pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin.

Inovasi : pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.



Kolaborasi : perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, yaitu :

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa



bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat 2018-2023, meliputi:

**“Relijius – Bahagia – Adil – Inovatif –
Kolaboratif”**

Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Prioritas pembangunan daerah merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan sekaligus juga merupakan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018- 2023. Terdapat 9 (sembilan) prioritas pembangunan yang merupakan janji kepala daerah dan menjadi prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD, serta penambahan 1 (satu) prioritas sehubungan dengan pandemi COVID- 19. Adapun prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 terdiri dari 1 + 9, meliputi:



1. Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemi COVID-1;

dan 9 prioritas pembangunan, yaitu:

1. Akses pendidikan untuk semua
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata
5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara
6. Infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup
7. Gerakan membangun desa (Gerbang desa)
8. Subsidi gratis golongan ekonomi lemah (golekmah)

Penetapan isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal. Dengan mengerahkan segenap potensi dan peluang serta sumber daya yang ada untuk mencari solusi bagi permasalahan dan tantangan pembangunan, diharapkan dapat ditetapkan isu strategis yang berdaya ungkit bagi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat. Sehingga isu strategis pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat, adalah:

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia
2. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan
5. Reformasi Birokrasi



Telaahan dari RPJMN dan RPJMD Jawa Barat masih ada beberapa faktor yang menjadi menghambat dan mendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah antara lain belum terpenuhinya kebutuhan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang ada di tingkat kewilayahan guna meningkatkan pelayanan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan tersedianya anggaran untuk pembangunan kewilayahan yang semakin membaik dengan harapan dapat meningkatkan inovasi pembangunan dikewilayahan sesuai kebutuhan masyarakat

3.4.1 Penelaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Penelaahan dilakukan terhadap kesesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta rencana indikasi program pemanfaatan ruang. Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi secara geografis arah pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

A. Rencana Struktur Ruang

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang



didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;

- b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Untuk mendukung struktur ruang, rencana hirarki pusat pelayanan wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 3 hirarki, yaitu:

- a. Pusat Pelayanan Kota (PPK) melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
- b. Subpusat Pelayanan Kota (SPK) yang melayani Sub wilayah Kota (SWK); dan
- c. Pusat Lingkungan (PL).

Sesuai Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031, arahan struktur ruang dibagi menjadi 8 (delapan) Subwilayah Kota (SWK) yang dilayani oleh 2 (dua) Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan 8 (delapan) Subpusat Pelayanan Kota (SPK). Dalam RTRW Kota Bandung, PPK yang direncanakan terdiri dari PPK Alun-alun dan PPK Gedebage. PPK Alun-alun berada di bagian barat yang melayani SWK Cibeunying, Karees, Bojonegara dan Tegalega, sedangkan PPK Gedebage



bagian timur melayani SWK Arcamanik, Derwati, Kordon, dan Ujungberung.

Pusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/ rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi, tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya.

Untuk pengembangan SPK di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

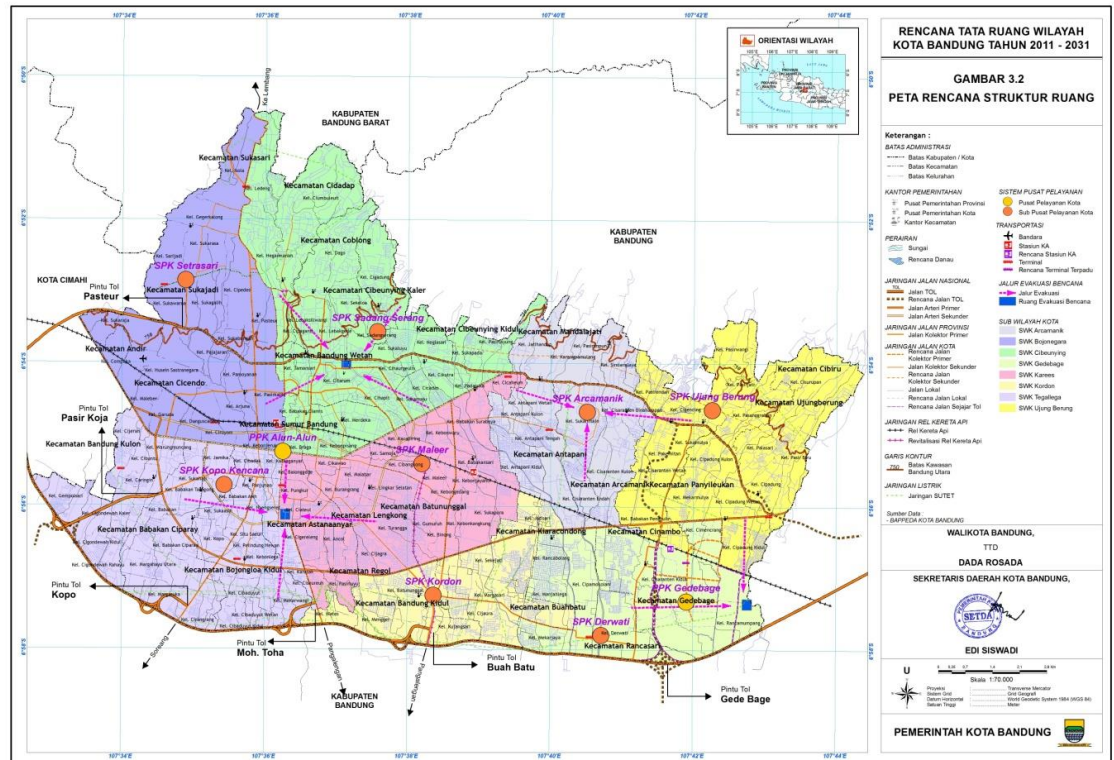
- a. Subwilayah Kota Bojonagara dengan Subpusat Pelayanan Setrasari, meliputi Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir;
- b. Subwilayah Kota Cibeunying dengan Subpusat Pelayanan Sadang Serang meliputi Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying Kidul, Babakan Ciparay;
- c. Subwilayah Kota Tegallega dengan Subpusat Pelayanan Kopo Kencana, meliputi Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astana Anyar;
- d. Subwilayah Kota Karees dengan Subpusat Pelayanan Maleer, meliputi Kecamatan Regol, Lengkong, Kiaracandong, Batununggal;
- e. Subwilayah Kota Arcamanik dengan Subpusat Pelayanan Arcamanik, meliputi Kecamatan Arcamanik, Mandalajati, Antapani;



- f. Subwilayah Kota Ujungberung dengan Subpusat Pelayanan Ujungberung meliputi Kecamatan Babakan Ciparay, Ujungberung, Cinambo, Panyileukan;
- g. Subwilayah Kota Kordon dengan Subpusat Pelayanan Kordon, meliputi Kecamatan Bandung Kidul, Buah; dan
- h. Subwilayah Kota Gedebage dengan Subpusat Pelayanan Derwati, meliputi Kecamatan Gedebage, Rancasari.

SPK minimum memiliki fasilitas skala subwilayah kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Kemudian Pusat Lingkungan terdiri dari pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan dan kelurahan. Secara lengkap, rencana struktur ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut:

Gambar 4.1
Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung



B. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang terdiri dari pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pola ruang dalam RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 terdiri atas:

- a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;
- b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bandung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan



setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya. Dalam rangka perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung di Kota Bandung, rencana yang dilakukan:

- a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;
- b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
- c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
- d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
- f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;
- g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

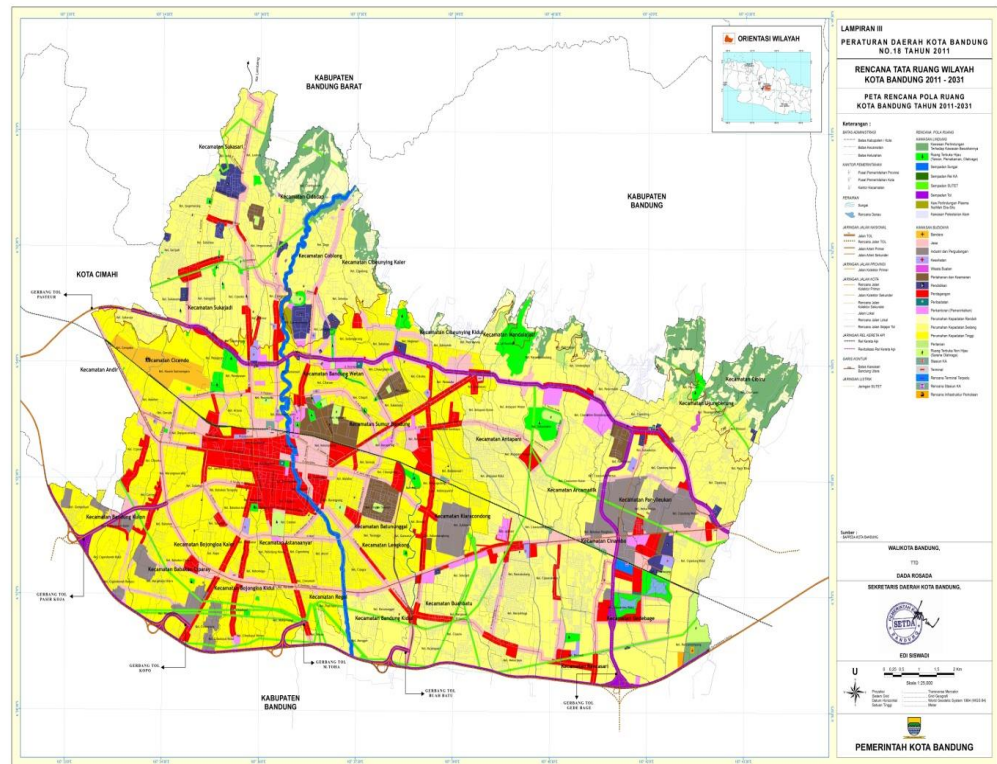


Kawasan budidaya terdiri dari atas kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya. Dalam rangka pengembangan kawasan budidaya, rencana yang dilakukan meliputi:

- a. mengembangkan pola ruang kota yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi;
- b. mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Bandung bagian timur yang terdiri atas SWK Arcamanik, SWK Ujung Berung, SWK Kordon, dan SWK Gedebage;
- c. mengendalikan bagian barat kota yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegallega, dan SWK Karees;
- d. membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTNH; dan
- f. menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada kawasan peruntukan lainnya.

Secara lengkap, rencana pola ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut.

Gambar 4.2
Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung



3.4.2 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Periode IV)

Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan dalam RPJPD. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan RPJPD Kota Bandung 2005-2025 melalui Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008. Sebagaimana diketahui pula pada setiap tahap 5 (lima) tahunan RPJPD tersebut menjadi pedoman atau arahan penyusunan RPJMD, yaitu: Tahap I (2005-2008), Tahap II (2009-2013), Tahap III (2014-2018), Tahap IV (2019-2023), dan Tahap V (2024-2025).



Visi Daerah Kota Bandung pada Tahun 2025 adalah: **“KOTA BANDUNG BERMARTABAT”** (*BANDUNG DIGNIFIED CITY*). Kata “Bermartabat” tersebut yang juga merupakan bagian dari visi Kota Bandung terdahulu sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2004 yaitu “Kota Jasa yang BERMARTABAT”, masih relevan untuk dijadikan visi Kota Bandung Tahun 2005-2025 tetapi dengan pemaknaan yang lebih filosofis. Bermartabat disini merupakan kata secara harfiah, yang mempunyai arti harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota yang dapat dijadikan teladan karena ketakwaanya, kemakmuran, kebersihan, ketertiban, ketaatan, keamanan, dan berkeadilan. Jadi, kota bermartabat adalah kota yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan dan harkat kemanusiaan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2025 telah mengamanatkan target capaian pembangunan daerah Kota Bandung setiap 5 (lima) tahunan.

3.1.1 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023

Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung menguraikan kebijakan pemerintah Daerah Kota Bandung dalam menjawab isu strategis Kota Bandung yaitu :

1. pendidikan
2. Peningkatan derajat masyarakat
3. Tata kelola pemerintahan
4. Ketimpangan ekonomi
5. Optimalisasi infrastruktur dan penataan ruang



6. Lingkungan hidup berkualitas dan optimalisasi pengelolaan persampahan
7. Penanggulangan kemiskinan dan PMKS
8. Sinergitas pembiayaan pembangunan

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka menengah daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis di atas maka visi Kota Bandung tahun 2018-2023, yaitu : **“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis”** dengan misi sebagai berikut :

1. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih
3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan
4. Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
5. Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi
- 6.

3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan



hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung pada tahun 2018 - 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap



pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Setiap Misi

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih	Terlaksananya Reformasi Birokrasi Yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	<p>Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur</p> <p>Meningkatkan integritas aparatur sebagai pelayan masyarakat</p> <p>Meningkatkan kapasitas manajemen pengawasan</p> <p>Penguatan kelembagaan tepat ukuran dan tepat fungsi</p> <p>Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan</p> <p>Meningkatkan kinerja instansi pemerintah</p> <p>Meningkatkan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien</p> <p>Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas</p>
	Misi 5: Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi	Optimalisasi Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan	Mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam berpartisipasi dan berkolaborasi pada pembangunan kota



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

			Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Swasta dalam Pembangunan	Mengembangkan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan melalui kerjasama daerah (antara lain pengelolaan TJSL/TJSL, kerjasama pemerintah daerah dengan pihak lain, pembiayaan infrastruktur non anggaran pemerintah, dan lain-lain)
--	--	--	--	--



**BAB IV
TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN
KEBIJAKAN**



**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Babakan
Ciparay**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan 2 (dua) misi Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung adalah sebanyak 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran, tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, **diperlukan data dan informasi yang relevan**



*Rencana Stratejik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

dengan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung secara memadai, serta **menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif)** serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung sedang **merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan.** Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung pada periode Tahun 2018 - 2023, secara rinci diuraikan pada tabel berikut :



**Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan**

NO	STRATEGI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
1	Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Babakan Ciparay	- Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai	80.50	81.00	81.50	81.80	85.70
	Meningkatkan kapasitas manajemen pengawasan		- Meningkatkan peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	- Persentase Kelurahan Unggul	%	50%	50%	50%	75%	100%
	Penguatan kelembagaan tepat ukuran dan tepat									



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

	fungsi									
	Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan									
	Meningkatkan kinerja instansi pemerintah									
	Meningkatkan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien									
	Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas									
2	Mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam berpartisipasi dan berkolaborasi pada pembangunan kota	Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat	- Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	- Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	78.50 %	79.00 %	80.00 %	82.00 %	82.50 %



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

Mengembangkan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan melalui kerjasama daerah (antara lain pengelolaan TJSL/TJSL, kerjasama pemerintah daerah dengan pihak lain, pembiayaan infrastruktur non anggaran pemerintah, dan lain-lain)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

\



Tabel 4.2

FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN /KRITERIA	PROGRAM	FORMULASI/CARA PENGUKURAN
					FORMULASI/CARA PENGUKURAN		
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan BABAKAN CIPARAY	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan BABAKAN CIPARAY	Nilai	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
						Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah Ruas Jalan, Kerb, RTH dan Ruas Jalan dibagi target
		Persentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti tepat			
		Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	% Rata rata RW Unggul + LKK Unggul + Siskamling Aktif	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
---	--	--------------------------------------	---	---	---	----------------------------------	---



Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan profil kinerja aparatur pemerintah yang kuat dan memiliki mental melayani, hal ini merupakan turunan dari konsep demokratisasi yang secara eksplisit menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Konsekuensi logis dari fenomena di atas adalah pemerintah berkewajiban membangun sebuah kekuatan aparatur yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan aspiratif terhadap segala kondisi kemasyarakatan yang muncul di masing-masing wilayah. Mewujudkan pelayanan publik yang prima menjadi dasar bagi pencapaian misi Kecamatan Babakan Ciparay dengan aparat yang profesional. Penghayatan terhadap masing-masing peran dan tanggung jawab sebagai aparat negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat mutlak dibutuhkan. Kinerja aparatur pemerintah harus dapat diukur dengan parameter terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal pembangunan diperlukan sebagai langkah membangun sebuah pemerintah yang akuntabel.

Tujuan pertama berkaitan dengan Membangun sistem dan budaya pelayanan publik yang prima dengan sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target nilai A pada tahun 2017 sesuai dengan target RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023, Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kecamatan dengan indikator Tingkat Kinerja Bidang Tugas Umum Pemerintahan (Seksi) dengan target skala 0,88 pada tahun 2018, Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dengan indikator Rata-rata tingkat inovasi lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK) dengan target skala tinggi pada tahun 2017 sesuai dengan target RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023,

Tujuan kedua berkaitan dengan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dengan sasaran Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas Kinerja Birokrasi dengan indikator Nilai evaluasi AKIP



dengan target nilai A pada tahun 2018 sesuai dengan target RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 indikator Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti dengan target 100% dalam rangka mendukung agenda Walikota Bandung road to WTP 2015, Tertib administrasi barang / aset daerah dengan target 100% dalam rangka mendukung agenda Walikota Bandung road to WTP 2015.

Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung 2018 - 2023 tersebut diatas dapat menunjukkan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



5.1 Strategi Organisasi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam menunjang keberhasilan misi pembangunan daerah Kota Bandung yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan perangkat daerah sehingga dapat memberikan gambaran pelayan kepada masyarakat. Dengan *grand design* yang baik dapat menjawab suatu permasalahan baik yang sudah terjadi, sedang terjadi dan yang akan terjadi. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan di kewilayahan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya dan merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan perangkat daerah.

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kota Bandung tahun 2018-2023 yaitu analisis *Logic Model* atau Model Logika.

Logic model adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. *Logic*

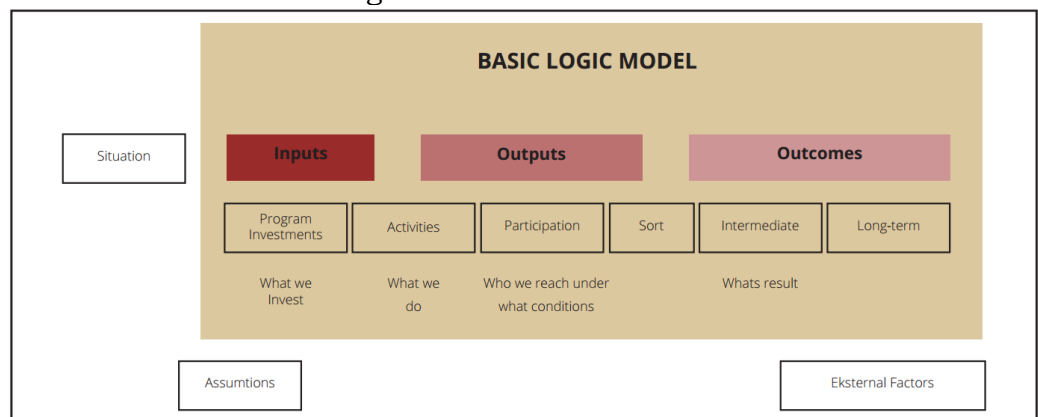


model ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. *Logic model* adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan yang terlibat dan terdampak.

Logic model membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kota Bandung. Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, output pada urusan teknis atau perangkat daerah.

Hubungan antara unsur-unsur terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi pemerintah maupun pada perangkat daerah. Visualisasi logic model dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 5.1
Logic Model





1.2 Kebijakan Organisasi

Langkah selanjutnya, setelah penetapan tujuan dan sasaran, maka dalam perencanaan strategis operasional dibutuhkan kebijaksanaan atau cara untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Berbagai ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung, sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat untuk memperlancar dan menperpadukan setiap usaha untuk mencapai tujuan, sasaran serta visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya haruslah di tuangkan dalam bentuk kebijakan.

Dengan demikian maka arah makro kebijakan Kecamatan Babakan Ciparay adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Babakan Ciparay
2. Kebijakan meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

5.1.2 Nilai nilai Strategis Organisasi

Sebagai Institusi yang merupakan bagian dari Pemerintah Kota Bandung Kecamatan Babakan Ciparay berpegang pada nilai nilai yang terkandung dalam Visi Kota Bandung yaitu terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera yang merupakan perwujudan dari harapan warga Kota Bandung. Nilai nilai tersebut dituangkan



dalam bentuk keinginan untuk mewujudkan Kota Bandung dan kehidupan warganya yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera

Kecamatan Babakan Ciparay juga memiliki nilai nilai strategis tersendiri yaitu :

- 1. Aman**, diharapkan Aparat Kecamatan Babakan Ciparay dapat bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, serta bersama masyarakat dapat menjaga kondusifitas dan rasa nyaman di lingkungan Kecamatan Babakan Ciparay
- 2. Berkualias** diharapkan Aparatur Kecamatan dapat dipercaya dalam mengemban tugas pokok dan fungsi yang diberikan dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima
diharapkan Kecamatan Babakan Ciparay Mampu Cepat menanggapi dan bertindak dalam memberikan pelayanan Publik yang Prima
- 3. Rapih** diharapkan Kecamatan Babakan Ciparay menciptakan gagasan baru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparatur dan pelayanan kepada masyarakat;
- 4. Tuntas**, diharapkan Aparatur Kecamatan Babakan Ciparay Cepat menanggapi dan bertindak dalam memberikan pelayanan Publik yang Prima kepada Masyarakat;



5.1.3 Faktor - Faktor Kunci Keberhasilan

Adapun faktor-faktor kunci keberhasilan di Kecamatan Babakan Ciparay diantaranya adalah :

1. Komitmen dan sinergi yang kuat dari aparatur Pemerintah Kecamatan dan warga Kecamatan Babakan Ciparay.
2. Ketertiban dan keamanan di Kecamatan Babakan Ciparay yang kondusif.
3. Kepemimpinan Kecamatan Babakan Ciparay yang ditunjang kemampuan manajerial yang unggul, dan mampu menjadi motivator dan dinamisator lingkungan kecamatan.
4. Sumber Daya Manusia (pegawai) Kecamatan Babakan Ciparay yang menjunjung profesionalisme, berkomitmen kuat terhadap tujuan organisasi serta memiliki dedikasi dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
5. Kebijakan kecamatan yang terintegrasi dengan kebijakan kota, mampu menjamin kesinambungan program dan berbasis pada kebutuhan lokal.
6. Keterpaduan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi dengan menghilangkan ego sektoral.
7. Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu memacu peningkatan kinerja setiap pegawai.
8. Tersedianya prasarana dan sarana kantor yang dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpelihara.
9. Konsisten dan fokus terhadap evaluasi perkembangnya dan kemajuan untuk perbaikan dan penyempurnaan pelayanan prima.



5.1 KEBIJAKAN ORGANISASI

Setelah penetapan Tujuan dan Sasaran maka langkah selanjutnya dalam perencanaan strategis operasional dibutuhkan kebijakan atau cara untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan

Berbagai ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur Pemerintah dan masyarakat untuk memperlancar dan memadukan setiap usaha untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah diuraikan sebelumnya haruslah dituangkan dalam bentuk kebijakan.

Dengan demikian maka arah kebijakan Kecamatan Babakan Ciparay adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Babakan Ciparay
2. Kebijakan meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil analisa strategi dan arah kebijakan dalam percepatan tercapainya misi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk di Kecamatan Babakan Ciparay dapat dilihat di tabel dibawah ini :



**Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

Visi	Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis		
Misi 2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani		
Tujuan	Terlaksananya Reformasi Birokrasi Yang Efektif dan Efisien		
Sasaran	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		
Strategi	1. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur		
	2. Meningkatkan integritas aparatur sebagai pelayan masyarakat		
	3. Meningkatkan kapasitas manajemen pengawasan		
	4. Penguatan kelembagaan tepat ukuran dan tepat fungsi		
	5. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan		
	6. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah		
	7. Meningkatkan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien		
	8. Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan



Terlaksananya Pelayanan Publik yang prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Mengoptimalkan Sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik
	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Mengoptimalkan pemenuhan janji walikota oleh aparatur kecamatan dan kelurahan	Meningkatkan peran partisipasi masyarakat dalam merealisasikan program prioritas pemerintah kota Bandung
Misi 5	Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi		
Tujuan	Optimalisasi Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan		
Sasaran	1. Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan 2. Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Swasta dalam Pembangunan		
Strategi	1. Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan 2. Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Swasta dalam Pembangunan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta



kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

Rencana Kerja Kecamatan Babakan Ciparay pada periode 2018-2023. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya factor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan public lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan dalam rangka pencapaian 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran kinerja Kecamatan Babakan Ciparay periode tahun 2018-2013 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 6.1

**RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BABAKAN CIPARAY
TAHUN 2018-2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi	100%	100%	2.024.037.003	100%	2.226.440.703	100%	2.449.084.774	100%	2.693.993.251	100%	2.963.392.576	100%	12.356.948.307		
		01.002	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.</i>	<i>Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	12 Lap	12 Lap	245.241.895	12 Lap	269.766.085	12 Lap	296.742.693	12 Lap	326.416.962	12 Lap	359.058.658	12 Lap	1.497.226.293	Kec. Babakan Ciparay	Kec + Kel
		01.006	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.</i>	<i>Jumlah laporan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.</i>	35 Unit	35 Unit	9.226.200	35 Unit	10.148.820	35 Unit	11.163.702	35 Unit	12.280.072	35 Unit	13.508.079	35 Unit	56.326.874		Kec + Kel
		01.008	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor.</i>	<i>Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan</i>	12 Lap	12 Lap	4.800.000	12 Lap	5.280.000	12 Lap	5.808.000	12 Lap	6.388.800	12 Lap	7.027.680	12 Lap	29.304.480		Kec + Kel



*Rencana Stratejik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

				Kantor															
		01.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi	54 Unit	54 Unit	53.150.000	54 Unit	58.465.000	54 Unit	64.311.500	54 Unit	70.742.650	54 Unit	77.816.915	54 Unit	324.486.065		Kec + Kel
		01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang terrealisasi	1 Pkt	1 Pkt	186.016.888	1 Pkt	204.618.577	1 Pkt	225.080.434	1 Pkt	247.588.478	1 Pkt	272.347.326	1 Pkt	1.135.651.703		Kec + Kel
		01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	0 jenis	0 jenis	180.275.158	0 jenis	198.302.674	0 jenis	218.132.941	0 jenis	239.946.235	0 jenis	263.940.859	0 jenis	1.100.597.867		Kec + Kel
		01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	1 Lap	1 Lap	48.263.150	1 Lap	53.089.465	1 Lap	58.398.412	1 Lap	64.238.253	1 Lap	70.662.078	1 Lap	294.651.357		Kec + Kel
		01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	4 Lap	4 Lap	43.017.600	4 Lap	47.319.360	4 Lap	52.051.296	4 Lap	57.256.426	4 Lap	62.982.068	4 Lap	262.626.750		Kec + Kel
		01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	4 Lap	4 Lap	41.844.000	4 Lap	46.028.400	4 Lap	50.631.240	4 Lap	55.694.364	4 Lap	61.263.800	4 Lap	255.461.804		Kec + Kel



*Rencana Stratejik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

		01.015	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Lap	12 Lap	243.04 1.343	12 Lap	267.345. 477	12 Lap	294.08 0.025	12 Lap	323.488. 028	12 Lap	355.836. 830	12 Lap	1.483.7 91.703		Kec + Kel
		01.016	Penyediaan makanan dan minuman.	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman	12 Lap	12 Lap	129.51 6.769	12 Lap	142.468. 446	12 Lap	156.71 5.290	12 Lap	172.386. 820	12 Lap	189.625. 501	12 Lap	790.71 2.826		Kec + Kel
		01.017	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	2 Lap	2 Lap	160.00 0.000	2 Lap	176.000. 000	2 Lap	193.60 0.000	2 Lap	212.960. 000	2 Lap	234.256. 000	2 Lap	976.81 6.000		Kec + Kel
		01.018	Penyediaan jasa tenaga kerja pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	12 Lap	12 Lap	679.64 4.000	12 Lap	747.608. 400	12 Lap	822.36 9.240	12 Lap	904.606. 164	12 Lap	995.066. 780	12 Lap	4.149.2 94.584		Kec + Kel
		02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik	100%	100%	1.136.6 26.628	100%	1.250.28 9.291	100%	1.375.3 18.220	100%	1.512.85 0.042	100%	1.664.13 5.046	100%	6.939.2 19.227		
		02.010	Pengadaan Pengadaan Mebelair	Jumlah Laporan Pengadaan Pengadaan Mebelair	4 jenis	4 jenis	144.98 1.184	4 jenis	159.479. 302	4 jenis	175.42 7.233	4 jenis	192.969. 956	4 jenis	212.266. 951	4 jenis	885.12 4.626		Kel Cirangr ang
		02.022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.	Jumlah Laporan Pemeliharaan rutin/ berkala	7 Lap	7 Lap	325.14 6.724	7 Lap	357.661. 396	7 Lap	393.42 7.536	7 Lap	432.770. 290	7 Lap	476.047. 319	7 Lap	1.985.0 53.265		Kec + Kel



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

				<i>gedung kantor.</i>														
		02.024	<i>Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas</i>	<i>Jumlah Laporan Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas</i>	35 Unit	35 Unit	666.49 8.720	35 Unit	733.148. 592	35 Unit	806.46 3.451	35 Unit	887.109. 796	35 Unit	975.820. 776	35 Unit	4.069.0 41.335	Kec + Kel
		03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	30.000. 000	100%	33.000.0 00	100%	36.300. 000	100%	39.930.0 00	100%	43.923.0 00	100%	183.15 3.000	
		03.002	<i>Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.</i>	<i>Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.</i>	2 Stel	2 Stel	30.000. 000	2 Stel	33.000.0 00	2 Stel	36.300. 000	2 Stel	39.930.0 00	2 Stel	43.923.0 00	2 Stel	183.15 3.000	Kec + Kel
		05	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	100%	75.504. 000		83.054.4 00		91.359. 840		100.495. 824		110.545. 406		460.95 9.470	
		05.004	<i>Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur</i>	<i>Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur</i>	54 Orang	54 Orang	75.504. 000	54 Orang	83.054.4 00	54 Orang	91.359. 840	54 Orang	100.495. 824	54 Orang	110.545. 406	54 Orang	460.95 9.470	Kec + Kel
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat				Nilai Rata rata Indeks Kepuasan Masyarakat														



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

san Masya rakat				(IKM) Kecamatan Babakan Ciparay															
Meni ngka tnya pera n kele mba gaan , masy arak at dala m kea man an dan keny aman an lingk unga n				Persentase Kelurahan Unggul	N/A	N/A	50%	50%	75%	100%	65%								
			<i>Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan</i>	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan	N/A	N/A	2.482.746.650	75%	2.731.021.315	76%	3.004.123.447	78%	3.304.535.791	80%	3.634.989.370	80%	15.157.416.573		



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

			lingkungan	kenyamanan lingkungan															
		15.005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	57 RW		1.277.739.150		1.405.513.065		1.546.064.372		1.700.670.809		1.870.737.890	57 RW	7.800.725.285		Kec + Kel
		25.005	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif	455 Kader	32 Kader	395.465.000	32 Kader	435.011.500	32 Kader	478.512.650	32 Kader	526.363.915	32 Kader	579.000.307	32 Kader	2.414.353.372		Kec + Kel
		33.001	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah kelompok/kader RW siaga	6 Kader	2 Kader	506.490.000	2 Kader	557.139.000	2 Kader	612.852.900	2 Kader	674.138.190	2 Kader	741.552.009	2 Kader	3.092.172.099		Kec + Kel
		25.001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	pembentukan koperasi di tempat ibadah	64 Usaha	64 Usaha	188.086.000	64 Usaha	206.894.600	64 Usaha	227.584.060	64 Usaha	250.342.466	64 Usaha	275.376.713	64 Usaha	1.148.283.839		Kec + Kel
		19.053	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPД kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	8 Lap	8 Lap	114.966.500	8 Lap	126.463.150	8 Lap	139.109.465	8 Lap	153.020.412	8 Lap	168.322.453	8 Lap	701.881.979		Kec + Kel
	Meningkatnya Kepuasan			Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80	80		80,52		80,82		81,21		81,55		81,55			



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

n Mas yara kat terh ada p Pela yan an Publ ik Kec ama tan Bab aka n Cipa ray																			
		42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi bersih	100%	100%	2.502.875.680	100%	2.753.163.248	100%	3.028.479.573	100%	3.331.327.530	100%	3.664.460.283	100%	15.280.306.314		
		42.014	<i>Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan</i>	<i>Panjang Drainase terpelihara</i>	n/a	850M	2.367.488.180	850M	2.604.236.998	850M	2.864.660.698	850M	3.151.126.768	850M	3.466.239.444	850M	14.453.752.088		Kec + Kel



*Rencana Stratejik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

		42.015	Kegiatan Pemeliharaan RTH Kecamatan	luas RTH kecamatan terpelihara	n/a	1200M2	29.452.500	1200M2	32.397.750	1200M2	35.637.525	1200M2	39.201.278	1200M2	43.121.405	1200M2	179.810.458		Kec. Babakan Ciparay
		42.016	Kegiatan pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang kerb terpelihara	n/a	10000M2	105.935.000	10000M2	116.528.500	10000M2	128.181.350	10000M2	140.999.485	10000M2	155.099.434	10000M2	646.743.769		Kec. Babakan Ciparay
		20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	100%	100%	1.752.906.000	100%	1.928.196.600	100%	2.121.016.260	100%	2.333.117.886	100%	2.566.429.675	100%	10.701.666.421		
		20.001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayah	Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	15 Jenis	15 Jenis	83.110.000	15 Jenis	91.421.000	15 Jenis	100.563.100	15 Jenis	110.619.410	15 Jenis	121.681.351	15 Jenis	507.394.861		Kec + Kel
		20.002	Kegiatan Pembinaan RT RW	Jumlah RT RW mendapatkan pembinaan	57	57	1.669.796.000	57	1.836.775.600	57	2.020.453.160	57	2.222.498.476	57	2.444.748.324	57	10.194.271.560		Kec + Kel
Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat				Tingkat Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan															



*Rencana Stratejik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

Meningkatnya Pembedayaan Masyarakat				Tingkat Pembedayaan Lembaga Kemasyarakatan														
	26	Program Inovasi Pembangunan dan Pembedayaan Kewilayahan		Tingkat Pembedayaan Lembaga Kemasyarakatan	77,85%	78,50%	6.558.496.821	79%	7.050.000.000	80%	8.125.000.000	82%	8.125.000.000	82,50%	9.200.000.000	82,50%	39.058.496.821	
	26.001	<i>Kegiatan Fasilitasi Pembedayaan lingkup RW</i>	<i>Jumlah Sub KegiatanPembedayaan Lingkup RW</i>	356 Sub Keg	356 Sub Keg	5.011.322.950	356 Sub Keg	5.550.000.000	356 Sub Keg	6.475.000.000	356 Sub Keg	6.475.000.000	356 Sub Keg	7.400.000.000	356 Sub Keg	30.911.322.950		Kelurahan
	26.002	<i>Kegiatan Fasilitasi Pembedayaan lingkup PKK</i>	<i>Jumlah Sub KegiatanPembedayaan Lingkup PKK</i>	76 Sub Keg	76 Sub Keg	555.141.653	76 Sub Keg	500.000.000	76 Sub Keg	550.000.000	76 Sub Keg	550.000.000	76 Sub Keg	600.000.000	76 Sub Keg	2.755.141.653		Kelurahan
	26.003	<i>Kegiatan Fasilitasi Pembedayaan lingkup Karang Taruna</i>	<i>Jumlah Sub KegiatanPembedayaan Lingkup Karang Taruna</i>	73 Sub Keg	73 Sub Keg	517.475.918	73 Sub Keg	500.000.000	73 Sub Keg	550.000.000	73 Sub Keg	550.000.000	73 Sub Keg	600.000.000	73 Sub Keg	2.717.475.918		Kelurahan
	26.004	<i>Kegiatan Fasilitasi Pembedayaan lingkup LPM</i>	<i>Jumlah Sub KegiatanPembedayaan Lingkup LPM</i>	61 Sub Keg	61 Sub Keg	474.556.300	61 Sub Keg	500.000.000	61 Sub Keg	550.000.000	61 Sub Keg	550.000.000	61 Sub Keg	600.000.000	61 Sub Keg	2.674.556.300		Kelurahan



Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dirinci program-program utama yang mendukung secara langsung pencapaian kinerja utama Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung berdasarkan 3 (Tiga) sasaran yang telah ditetapkan, meliputi 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan indikatif, sebagai berikut :

Adapun Program dan kegiatan yang telah dirumuskan untuk tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017- 2018 adalah sebagai berikut:



**Tabel 6.2
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019- 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah	
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan	07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	80	7.608.862.898	82	8.369.749.188	82,5	9.206.724.107	82,5	Kec. Babakan Ciparay
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kelurahan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	80	7.288.413.898	82	8.017.255.288	82,5	8.818.980.817	82,5	Kec. Babakan Ciparay
		7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan Sarana dan prasarana di kelurahan terrealisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	57	3.780.799.848	57	4.158.879.833	57	4.574.767.816	57	Kec. Babakan Ciparay



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

	7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan terrealisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	3.507.614.050	4	3.858.375.455	4	4.244.213.001	4	Kec. Babakan Ciparay
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Babakan Ciparay	07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Siskamling RW Aktif	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50,8	1.192.983.900	52,6	1.312.282.290	61,4	1.443.510.519	61,4	Kec. Babakan Ciparay
	7.01.04.2.02	<i>Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</i>	<i>Persentase Siskamling RW Aktif</i>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50,8	1.192.983.900	52,6	1.312.282.290	61,4	1.443.510.519	61,4	Kec. Babakan Ciparay
	7.01.04.2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pembinaan siskamling RW	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	29	1.192.983.900	30	1.312.282.290	35	1.443.510.519	35	Kec. Babakan Ciparay



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Babakan Ciparay	07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase Kelurahan Unggul</i>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50	4.680.295.077	75	5.148.324.585	100	5.663.157.043	100	Kec. Babakan Ciparay
		7.01.02.2.01	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Persentase Laporan RT/RW tepat waktu</i>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	1.691.546.000	100	1.860.700.600	100	2.046.770.660	100	Kec. Babakan Ciparay
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan RT RW tepat waktu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	1.691.546.000	12	1.860.700.600	12	2.046.770.660	12	Kec. Babakan Ciparay
		7.01.02.2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	<i>Persentase Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP</i>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	27.888.000	100	30.676.800	100	33.744.480	100	Kec. Babakan Ciparay
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar	Jumlah Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	10.920.000	100	12.012.000	100	13.213.200	100	Kec. Babakan Ciparay



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

		Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	16.968.000	100	18.664.800	100	20.531.280	100	Kec. Babakan Ciparay
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan prasarana pelayanan publik dalam kondisi baik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	2.289.011.077	100	2.517.912.185	100	2.769.703.403	100	Kec. Babakan Ciparay
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Taman terpelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	2.289.011.077	2	2.517.912.185	2	2.769.703.403	2	Kec. Babakan Ciparay
			Panjang jalan dan saluran air terpelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6000		6000		0		6000	0



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

		7.01.02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Bidang di Kesejahteraan Sosial	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	671.850.000	12	739.035.000	12	812.938.500	12	Kec. Babakan Ciparay
		7.01.02.2.04.03	Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	671.850.000	12	739.035.000	12	812.938.500	12	Kec. Babakan Ciparay
	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Babakan Ciparay	07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	81,5	14.788.013.356	81,8	16.266.814.692	85,7	17.893.496.161	85,7	Kec. Babakan Ciparay
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	12.253.277.736	100	13.478.605.510	100	14.826.466.061	100	Kec. Babakan Ciparay



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	12.253.277.736	12	13.478.605.510	12	14.826.466.061	12	Kec. Babakan Ciparay
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	39.375.000	1	43.312.500	1	47.643.750	1	Kec. Babakan Ciparay
	7.01.01.2.05.02	<u>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</u>	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	39.375.000	1	43.312.500	1	47.643.750	1	Kec. Babakan Ciparay
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	759.494.820	100	835.444.302	100	918.988.732	100	Kec. Babakan Ciparay
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	22.527.000	4	24.779.700	4	27.257.670	4	Kec. Babakan Ciparay



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (termasuk ATK)	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	332.739.670	4	366.013.637	4	402.615.001	4	Kec. Babakan Ciparay
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	37.356.800	4	41.092.480	4	45.201.728	4	Kec. Babakan Ciparay
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan penyediaan bahan logistik kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	147.714.600	4	162.486.060	4	178.734.666	4	Kec. Babakan Ciparay
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	113.372.750	12	124.710.025	12	137.181.028	12	Kec. Babakan Ciparay
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	40.344.000	12	44.378.400	12	48.816.240	12	Kec. Babakan Ciparay
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	65.440.000	100	71.984.000	100	79.182.400	100	Kec. Babakan Ciparay



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	1.063.571.800	100	1.169.928.980	100	1.286.921.878	100	Kec. Babakan Ciparay
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	134.891.800	12	148.380.980	12	163.219.078	12	Kec. Babakan Ciparay
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jasa Kebersihan dan IT)	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	928.680.000	12	1.021.548.000	12	1.123.702.800	12	Kec. Babakan Ciparay
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	672.294.000	100	739.523.400	100	813.475.740	100	Kec. Babakan Ciparay
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Unit Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	635.354.000	100	698.889.400	100	768.778.340	100	Kec. Babakan Ciparay



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

		7.01.01.2. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	36.940.000	4	40.634.000	4	44.697.400	4	Kec. Babakan Ciparay
--	--	---------------------	--	---	-----	-----	-----	-----	-----	---	------------	---	------------	---	------------	---	-------------------------



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN



Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKIP tahunan.

Indikator Kinerja Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Babakan Ciparay untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung yaitu :

Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- i. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul
- ii. Persentase siskamling RW Aktif
- iii. Persentase Kelurahan Unggul
- iv. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Babakan Ciparay



*Rencana Stratejik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebelum dan sesudah Perubahan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.



Tabel 6.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018 – 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
					ALASAN	FORMULAS I/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Babakan Ciparay	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Babakan Ciparay	Nilai	81,5	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai Tupokasi dan merupakan IKU dan PK Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	Hasil Survey kepuasan Kecamatan dan kelurahan	9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Persentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindak	%	100	Merupakan PK dan Meminimalisasi temuan dalam	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti tepat	Sekretariat kec, BPK, Inspektorat	Tindaklanjut Temuan Inspektorat/BPK



No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
		lanjuti tepat waktu					rangka mewujudkan Bandung WTP	
2.	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	50	Merupakan PK Pelimpahan kewenangan dan dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota dan pelimpahan kewenangan	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul	Kecamatan	<p>Kriteria Kelurahan Unggul, memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 13 jenis kondisi di bawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib) <ul style="list-style-type: none"> - Ada kepengurusan - Ada program kerja - Mengikuti pelatihan - Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam kebakaran datang - Melakukan penyuluhan /motivasi kepada masyarakat 2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana)



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PENJELASAN		KETERANGAN /KRITERIA
							<ul style="list-style-type: none"> - Ada Kepengurusan - Gardu Sosial - Lumbung sosial - Peta Rawan Bencana - Melakukan penyuluhan kepada masyarakat kesiapsiagaan bencana <p>3. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca - Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp - Koran2 / majalah langganan kelurahan - Ada laporan pengunjung <p>4. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah</p> <ul style="list-style-type: none"> - petunjuk arah ke



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PENJELASAN		KETERANGAN /KRITERIA
							masjid - ada Pengingat /himbauan sholat berjamaah/alarm waktu sholat 5. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) - SK / SP - Ada Program Kerja - Monitoring Rawan Jentik - Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu - Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 6. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) - Data terpilah - satgas



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PENJELASAN		KETERANGAN /KRITERIA
							Pengarusutamaan gender (PUG) - Pelatihan pelatihan - Perlindungan bagi perempuan (KDRT) 7. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) - Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK - Memiliki data anak - Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA - Monitoring dan evaluasi 8. Septic Tank Komunal (Ekbang) - Minimal untuk 5 rumah



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PENJELASAN		KETERANGAN /KRITERIA
							<ul style="list-style-type: none"> - Jarak dengan sumber air bersih \geq 11 meter - Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga - Menggunakan pipa paralon - Menggunakan bak kontrol <p>9. Bank sampah tiap Kelurahan (Ekbang)</p> <p>10. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2019) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota Koperasi \geq 20 orang - Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas - Memiliki Akte



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PENJELASAN		KETERANGAN /KRITERIA
							Pendirian - Ada usaha simpan pinjam 11. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang) Kriteria: a. Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan b. Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan c. Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan d. Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PENJELASAN		KETERANGAN /KRITERIA
							<p>yang disebabkan ambias</p> <p>e. Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering</p> <p>f. Melakukan penyiraman pada musim kemarau</p> <p>12. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Pengurus - Ada Anggota - Ada AD/ART <p>13. Siskamling RW Aktif</p> <p>Kriteria Siskamling Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
								3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	80	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	(% RW Unggul + % PKK Unggul + Karang Taruna Unggul + LPM Unggul)/4	Kelurahan	RW Unggul (Minimal memenuhi salah satu metode Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat dan 50 % Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung) Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat : 1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PENJELASAN		KETERANGAN /KRITERIA
							skala rumah tangga 2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah 3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R 4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester 5. Sosialisasi dan Pemanfaatan sampah menjadi berguna 6. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya 50 % Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PENJELASAN		KETERANGAN /KRITERIA
							<p>dibawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 2. Urban Farming 3. Koperasi RW Juara (Pembentukan satgas anti renternir) 4. Laporan RW tepat waktu minimal form A : <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Kependudukan (Format A1-A5) b. Laporan Program KangPisMan sampah di wilayah RW (Format B dan C) c. Usulan Aspirasi Masyarakat dan Potensi Swadaya



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PENJELASAN		KETERANGAN /KRITERIA
							<p>Murni</p> <p>5. Koperasi di Sarana ibadah</p> <p>a. Memiliki Anggota</p> <p>b. Memiliki Kepengurusan</p> <p>c. Memiliki AD/ART</p> <p>6. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah antara lain :</p> <p>a. Sholat magrib dan atau shubuh berjamaah</p> <p>b. Kegiatan pengajian</p> <p>c. Mengaktifkan remaja masjid</p> <p>d. Masjid sebagai sarana berkumpul/silahturahmi</p> <p>7. RW berdaya</p> <p>a. Ada kepengurusan</p> <p>b. Ada kegiatan</p>



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PENJELASAN		KETERANGAN /KRITERIA
							<p>pengumpulan ziswa (Zakat, Infak, Shodakoh dan Wakaf)</p> <p>c. Adanya kegiatan sosial/pembangunan di RW yang dibiayai hasil ziswa (zakat, infak, shodakoh dan wakaf)</p> <p>8. Perpustakaan RW (Warga Gemar Membaca)</p> <p>9. 1 rumah 1 Kader Jumanti;</p> <p>10. Produk Unggulan berbasis Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>11. Taman Tematik ramah disabilitas</p> <p>12. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang;</p>



*Rencana Stratejik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PENJELASAN		KETERANGAN /KRITERIA
							13. 50 Penanaman Pohon 14. Sosialisasi Perencanaan Pemberdayaan; 15. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan; 16. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air; 17. Kelompok Lansia Sehat; 18. Posyandu Purnama; a. Kegiatan lebih dari 8 kali b. Kader lebih dari 5 orang c. Cakupan 5 kegiatan utama lebih dari 50 % : - KIA - KB - Imunisasi - Gizi - Pencegahan dan



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PENJELASAN		KETERANGAN /KRITERIA
							Penanggulangan Diare d. Ada Dana sehat 19. RW Siaga Bencana/RW Siaga; 20. Siskamling Aktif % PKK Unggul Kriteria PKK Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan PKK untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini : 1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup PKK



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PENJELASAN		KETERANGAN /KRITERIA
							2. Melaksanakan Sosialisasi Tenologi Tepat Guna 3. Melaksanakan penyuluhan KangPisMan 4. Sosialisasi bina keluarga 5. Sosialisasi ketertiban lingkungan 6. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 7. Koperasi PKK 8. Gerakan kebersihan dan pemanfaatan sampah 9. Pembinaan Posyandu % Karang Taruna Unggul Kriteria Karang Taruna Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan Karang Taruna untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PENJELASAN		KETERANGAN /KRITERIA
							<p>kegiatan dibawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup Karang Taruna 2. Membentuk dan melaksanakan Kagana 3. Melakukan pelatihan UED SP 4. Melakukan sosialisasi TTG 5. Melakukan sosialisasi pengolahan sampah 6. Pendataan PMKS dan PSKS 7. Sosialisasi Pencegahan



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PENJELASAN		KETERANGAN /KRITERIA
							<p>dan Penanggulangan bencana</p> <p>8. Event Olah raga</p> <p>9. Pusat pelayanan dan kreatif remaja (co-working space Kelurahan)</p> <p>% LPM Unggul Kriteria LPM Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan LPM untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</p> <p>1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai</p>



*Rencana Stratejik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PENJELASAN		KETERANGAN /KRITERIA
							ruang lingkup Karang Taruna 2. Melaksanakan pembinaan RW siaga 3. Melaksanakan BBGRM 4. Pendataan profil kelurahan 5. Sosialisasi perencanaan partisipasi pembangunan 6. Rembug warga kelurahan (Musrenbang tingkat kelurahan) 7. Sosialisasi Pemanfaatan teknologi tepat guna. 8. Pendataan partisipasi/swadaya masyarakat di lingkup RW



Tabel 6.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018 – 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	Sumber data: Kelurahan sebagai penanggungjawab kegiatan (PIPPK), Lembaga Kemasyarakatan sebagai penerima manfaat.	Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD. Lingkup kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah 2. Urban Farming 3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF) 4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang 5. Penanaman Pohon 6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan 7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. Pembinaan Posyandu 22. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup KARTA 23. Melakukan pelatihan UEP 24. Pendataan PMKS dan PSKS 25. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN 26. Event Olah Raga 27. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan) 28. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pem-



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<p>bangunan sesuai ruang lingkup LPM</p> <p>29. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna)</p> <p>30. Pendataan Profil Kelurahan</p> <p>31. Rembug Warga/Pra Musrenbang</p> <p>32. Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW</p>
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Babakan Ciparay	Persentase siskamling RW Aktif	%		Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	Kelurahan, dengan penanggungjawab Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	<p>Kriteria Siskamling Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Babakan Ciparay	Persentase Kelurahan Unggul	%		Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	Kelurahan, dengan penanggungjawab semua Kasi di Kecamatan	<p>Kelurahan Unggul adalah Kelurahan yang memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 10 jenis kondisi di bawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca - Memiliki koleksi buku \geq 30 exp



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<ul style="list-style-type: none"> - Koran2 / majalah langganan kelurahan - Ada laporan pengunjung <p>2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerakan Maghrib Mengaji, - Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah, - Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU), - Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an), <p>3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK / SP - Ada Program Kerja - Monitoring Rawan Jentik - Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu - Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) <p>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data terpisah - satgas Pengarusutamaan gender



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							(PUG) - Pelatihan pelatihan - Perlindungan bagi perempuan (KDRT) 5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) - Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK - Memiliki data anak - Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA - Monitoring dan evaluasi 6. Septic Tank Komunal (Ekbang) - Minimal untuk 5 rumah - Jarak dengan sumber air bersih \geq 11 meter - Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga - Menggunakan pipa paralon - Menggunakan bak kontrol 7. Kegiatan Kangpisman, memenuhi salah satu atau lebih dari:



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<ul style="list-style-type: none"> - Bank Sampah - Pemilahan Sampah - Pemanfaatan Sampah <p>8. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2021) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota Koperasi ≥ 20 orang - Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas - Memiliki Akte Pendirian - Ada usaha simpan pinjam <p>9. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Pengurus - Ada Anggota - Ada AD/ART <p>10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)</p>
4.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	Hasil Survey kepuasan Kecamatan dan kelurahan	9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)



*Rencana Strategik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
	Publik Kecamatan Babakan Ciparay	Kecamatan Babakan Ciparay		Tupokasi dan merupakan IKU dan PK Kecamatan			



BAB VIII PENUTUP



Dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Babakan Ciparay Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan program Pemerintah Kota Bandung. Dokumen ini merupakan penjabaran dari misi dan program pembangunan yang ditawarkan Walikota /Wakil Walikota yang terangkum dalam RPJMD dengan menyelaraskan tugas dan fungsi dari kecamatan.

Dokumen RENSTRA ini merupakan pedoman bagi pejabat struktural, masyarakat, dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Babakan Ciparay periode Tahun 2018-2023. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RENSTRA Kecamatan Babakan Ciparay Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Bandung. Rencana Kerja adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. Rencana Kerja Kecamatan Babakan Ciparay harus konsisten dan sinergis dengan dokumen Renstra Kecamatan Babakan Ciparay Tahun 2018-2023.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah ini akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Kerja dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) di masing masing pemangku jabatan yang ada dilingkungan Kecamatan.
3. Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja di pemangku jabatan dilingkungan Kecamatan Babakan Ciparay harus konsisten dengan Renstra Kecamatan Babakan Ciparay Tahun 2018-2023.



*Rencana Stratejik (RENSTRA)
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2018-2023*

4. RENSTRA Kecamatan Babakan Ciparay akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa dan untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi.
5. Dalam rangka efektivitas, perubahan RENSTRA Kecamatan Babakan Ciparay tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung tahun 2018-2023 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pejabat struktural yang ada dilingkungan Kecamatan Babakan Ciparay.

Bandung, 30 September 2021
CAMAT BABAKAN CIPARAY

H. SUPARJO,S.Sos
NIP. 19710325 199003 1 001